

## DAMPAK PEMBERLAKUAN BEA KELUAR TERHADAP KINERJA EKSPOR SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA

### *Impacts of Export Duties on Its Performance of The Marine and Fisheries Sector*

\*Estu Sri Luluh dan Tajerin

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan  
Gedung Balitbang KP I Lt. 4  
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia  
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 24 Agustus 2016 Diterima setelah perbaikan: 20 Oktober 2016

Disetujui terbit: 8 Desember 2016

\*email: s2luluh@gmail.com

#### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan bea keluar terhadap produk primer perikanan terhadap kinerja ekspor sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut. Kajian ini menggunakan data sekunder dengan mengambil Tabel I-O tahun 2008 yang kemudian disusun dalam bentuk *Computable General Equilibrium* (CGE) dengan menggunakan model Orani-G. Komoditas yang dianalisis adalah ikan Tuna Tongkol Cakalang (TTC), ikan tangkap lainnya, patin, kerapu, rumput laut, budidaya lainnya, udang, ikan kering dan ikan olahan. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan simulasi tiga skenario pemberlakuan bea keluar, yaitu 7,5% (sim-1), 15% (sim-2), dan 22,5% (sim-3). Hasil kajian menunjukkan bahwa skenario 3, yaitu pemberlakuan tarif bea keluar 22,5% memberikan dampak terbesar terhadap kinerja makro ekonomi diantaranya peningkatan GDP 0,01% dan konsumsi rumah tangga sebesar 0,046%. Dampak terhadap kinerja sektoral: (1) output dan nilai tambah produk primer perikanan mengalami penurunan terbesar pada ikan TTC sebesar 0,68%, sedangkan output dan nilai tambah produk olahan perikanan mengalami peningkatan terbesar pada ikan olahan sebesar 0,72%; (2) ekspor produk primer perikanan mengalami penurunan terbesar pada udang sebesar 35,81%, sedangkan ekspor produk olahan perikanan mengalami peningkatan terbesar pada ikan olahan sebesar 2,41%, dan; (3) impor produk primer perikanan produk olahan perikanan mengalami penurunan terbesar pada udang sebesar 23,09%. Implikasi kebijakannya adalah pemerintah dapat lebih meningkatkan ekspor melalui pengenaan bea keluar ini. Kebijakan tersebut harus dilakukan hati-hati dengan memperhatikan perubahan ekonomi di negara importir dan di dunia.

**Kata Kunci:** bea keluar, nilai tambah, ekspor, CGE, kelautan dan perikanan

#### ABSTRACT

*This paper aimed at analyzing the impact of export duties imposed on fishery primary products toward export performance of marine and fisheries in order to answer the issue. This study used input output table 2008 which is arranged in Computable General Equilibrium (CGE) form using Orani-G model. Commodities concerned were Tuna, Mackarel Tuna, Skipjack Tuna (TTC), catfish, grouper, seaweed, shrimp, dried fish, processed fish, other cached fishes and other aquaculture products. This study carried out with three scenarios of export duties, i.e. 7.5% (sim-1), 15% (sim-2), and 22.5% (sim-3). Results showed that 22.5% of export duties would give higher macro economic performance where GDP increase at 0.01% and household consumption increase at 0.046%. Impact on sectoral performance were: (1) output and value added of primary fishery products experienced largest decline in TTC by 0.68%, while the output and value added of processed fishery products experienced largest increase in processed fish by 0.72%; (2) export of primary fishery products experienced largest decline in shrimp by 35.81%, while exports of processed fishery products experienced largest increase in fish processed by 2.41%, and ; (3) imports of primary products for processed fishery products experienced largest decline in shrimp by 23.09%. Policy implication should be taken by the government was to increase the number of export products with imposing export duties. The imposed policies should be carefully handled and considered world economic changes, particularly to the targeting countries.*

**Keywords:** export duties, value added, export, CGE, marine and fisheries

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil produk perikanan di dunia dengan total produksi sebesar 20,84 juta ton pada tahun 2014 yang terdiri dari perikanan tangkap 6,48 juta ton dan perikanan budidaya 14,36 juta ton. Produksi perikanan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 7,35 persen (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2015). Potensi perikanan ini tentu pada gilirannya akan menumbuhkan industri perikanan Indonesia jika hasil produksinya mampu didistribusikan dan dijual ke pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya untuk meningkatkan nilai ekspor produk perikanan karena nilai ekspor hasil perikanan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sektor perikanan.

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir komoditas perikanan terbesar di dunia dengan komoditas unggulan udang, TTC, kepiting rajungan dan rumput laut. Nilai ekspor perikanan selama 12 tahun terakhir menunjukkan trend meningkat dengan laju pertumbuhan 8% per tahun (KKP, 2013). Pada tahun 2013, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai US\$ 4,16 miliar. Namun, data menunjukkan bahwa komoditas ekspor didominasi oleh bahan baku, baik dalam bentuk segar maupun beku. Kondisi ini dibuktikan dengan indeks spesialisasi produk perikanan Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara eksportir untuk komoditas yang termasuk bahan baku. Sebaliknya, indeks spesialisasi menunjukkan Indonesia menjadi negara pengimpor untuk produk olahan perikanan dalam bentuk kaleng, karagenan, atau bentuk olahan lainnya (Kusumastanto, 2008). Hal ini mengakibatkan komoditas ekspor perikanan Indonesia dihargai atau dinilai rendah sehingga kalah bersaing dengan produk perikanan dari negara-negara pesaing.

Kondisi ini juga dibuktikan dengan data dari Comtrade yang menunjukkan pada tahun 2010 UN-Comtrade memposisikan Thailand sebagai negara kedua terbesar dunia sebagai pemasok produk ikan olahan setelah Cina, sementara Indonesia hanya puas di posisi ke-10 terbesar dunia. Total kontribusi Thailand terhadap total ekspor produk ikan olahan mencapai 20,2 persen, sementara Indonesia hanya berkontribusi sebesar 2,7 persen dari total ekspor produk ikan olahan dunia (Suhana, 2012).

Permasalahan ini membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya agar bahan baku perikanan dapat diolah industri dalam negeri dan diekspor dalam bentuk jadi atau setengah jadi sehingga meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Hal ini diperlukan dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 mendatang yang membuka lebar pintu ekspor-impor komoditas antar negara Asia Tenggara. Pengenaan tarif bea keluar atau pajak ekspor merupakan salah satu cara agar bahan baku dapat diproses menjadi produk olahan oleh industri dalam negeri (Ratri, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan bea keluar atas komoditas primer perikanan terhadap kinerja ekspor sektor kelautan dan perikanan. Tujuan dari pemberlakuan bea keluar adalah mendorong pengembangan industri hilir produk perikanan yang berdampak pula pada peningkatan nilai tambah komoditas ekspor perikanan sehingga nilai ekspor Indonesia pun ikut meningkat secara signifikan.

## METODOLOGI

### Kerangka Teoritis

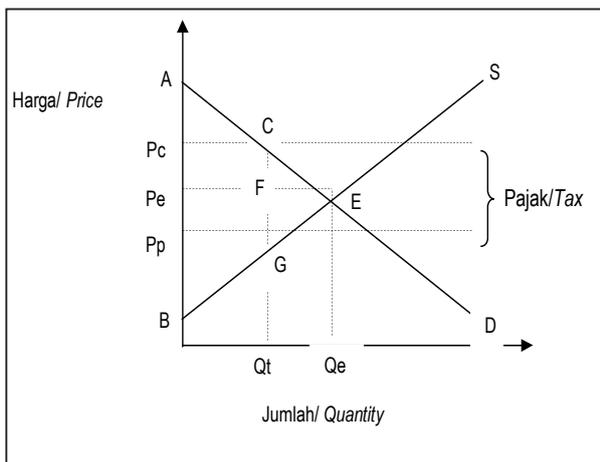
#### Pajak Ekspor atau Bea Keluar

Pajak ekspor atau bea keluar adalah pungutan pajak atas barang ekspor yang aspek legalitasnya diatur dalam pasal 2A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006. Pengaturan yang lebih khusus mengenai bea keluar ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor. Pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor bersifat pilihan, dalam arti kata tidak semua barang ekspor dikenakan bea keluar namun pemerintah atas pertimbangan tertentu "dapat" menetapkan bea keluar terhadap suatu barang ekspor (Surono dan Jafar, 2013).

Berdasarkan Undang-undang Kepabeanaan tujuan dasar pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor adalah untuk: a) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; b) Melindungi kelestarian sumber daya alam; c) Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau d) Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri (Surono dan Jafar, 2013).

**Dampak Kebijakan Bea Keluar**

Kebijakan pajak dan dampaknya dapat dijelaskan dengan menggunakan Gambar 1. Pada kondisi keseimbangan antara permintaan (D) dan penawaran (S) pada titik E yaitu  $Q_e$ , harga yang terbentuk adalah  $P_e$ . Dengan adanya pajak, maka harga konsumen akan naik menjadi  $P_c$  dan harga produsen turun menjadi  $P_p$ , dan jumlah produksi/konsumsi turun menjadi  $Q_t$ . Dengan penurunan jumlah konsumsi dan kenaikan harga konsumen, maka surplus ekonomi konsumen turun dari daerah  $PeEA$  menjadi  $PcCA$ , dan surplus produsen turun dari daerah  $PeEB$  menjadi  $PpDB$ . Pemerintah memperoleh penerimaan pajak sebesar daerah  $PpDCPc$ . Perekonomian secara keseluruhan kehilangan surplus ekonomi sebesar  $DEC$ , yang disebut sebagai *Deadweight Loss of Taxation*, yang berarti terjadi inefisiensi dalam perekonomian.



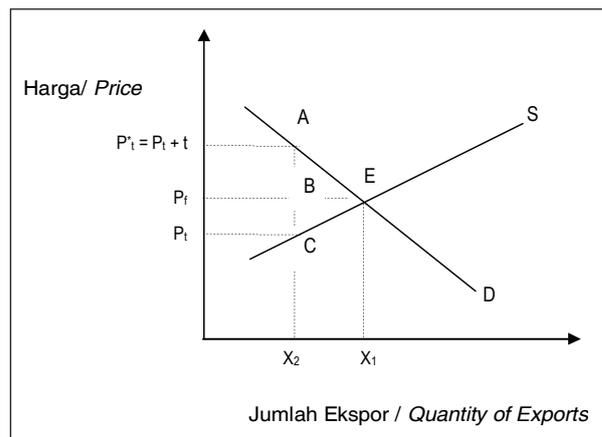
**Gambar1. Ilustrasi Dampak Pajak Terhadap Harga dan Jumlah Barang di Pasar.**  
**Figure 1. Impact Illustration of Tax to Price and Quantity of Goods in the Market.**

Sumber: Anonim (2011)/Source: Anonim (2011)

Dari ilustrasi tersebut di atas dapat dipastikan bahwa kebijakan pemberlakuan pajak akan selalu berdampak menaikkan harga konsumen dan dalam waktu yang bersamaan akan menurunkan harga produsen. Naiknya harga konsumen disebabkan naiknya biaya karena pajak yang akan menyebabkan terjadinya inflasi (*cost pushed inflation*) dan jika inflasi mencapai tingkat yang tinggi akan mengganggu kondisi makro ekonomi (Anonim, 2011).

Menurut Helpman dan Krugman (1989), penerapan bea keluar akan mengurangi harga domestik, sementara itu harga ekspor akan

meningkat. Dampak pemberlakuan pajak ekspor tersebut ditunjukkan oleh Gambar 2.



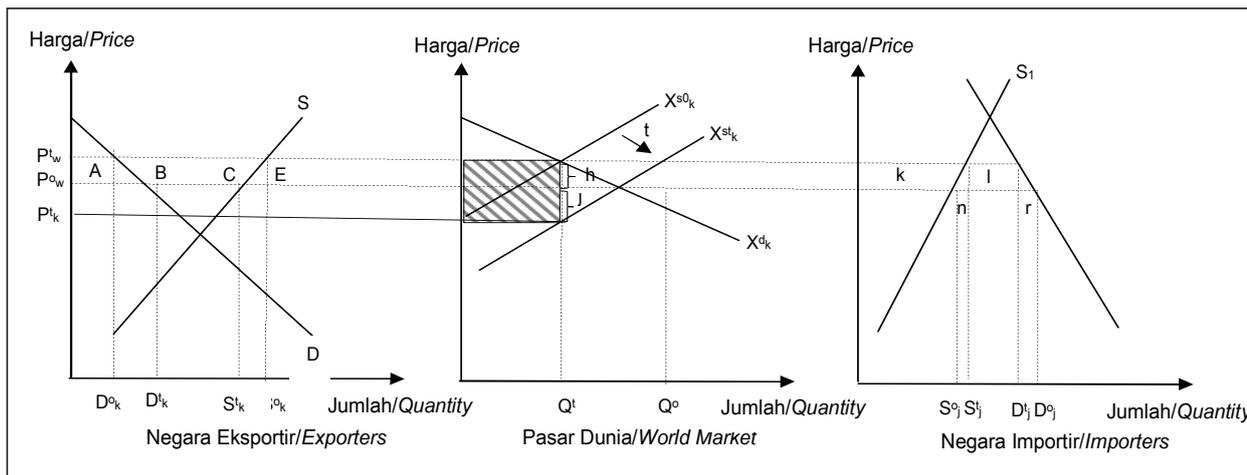
**Gambar 2. Pembebanan Bea Keluar**  
**Figure 2. The Imposition of Export Tax**

Sumber: Helpman dan Krugman (1989)/  
 Source: Helpman dan Krugman (1989)

Gambar 2 menggambarkan efek bea keluar sebesar  $t$ . Harga domestik akan turun menjadi  $P_t$ , mengurangi surplus produsen oleh area  $P_t E C P_t$ . Bagaimanapun, pendapatan hasil pajak sepadan dengan volume setelah pajak dikalikan dengan tarif pajak atau area  $P_t^* A C P_t$ , hilangnya pajak sama dengan area  $B E C$ , sementara itu keuntungan perdagangan sepadan dengan area  $P_t^* A B P_t$ .

Menurut Munadi (2007), pemberlakuan bea keluar mengimplikasikan kondisi yang lebih condong untuk membela kepentingan konsumen dalam negeri negara pengekspor dan produsen di negara pengimpor. Kenyataan ini ditunjukkan oleh Gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan bahwa pajak ekspor dikenakan dalam bentuk pajak ad valorem ( $t$ ). Dengan adanya pajak, harga dalam negeri di negara pengekspor sebesar  $P_k^t$ , sementara harga dalam negeri di negara pengimpor adalah sebesar  $P_w^t$  dengan jumlah ekspor yang disuplai sebesar  $Q_t$ . Produksi dalam negeri di negara pengimpor  $j$  meningkat dari  $OS_j^o$  menjadi  $OS_j^t$ . Produsen dalam negeri di negara pengekspor  $k$  dan konsumen di negara pengimpor  $j$  merupakan pihak yang dirugikan. Produksi di negara pengekspor akan menyusut dari  $OS_k^o$  menjadi  $OS_k^t$  sementara konsumsi di negara pengimpor  $j$  turun dari  $OD_j^o$  menjadi  $OD_j^t$ . Ekspor turun dari  $D_k^o S_k^o$  menjadi  $S_k^t D_k^t$ . Impor turun dari  $S_j^o D_j^o$  menjadi  $S_j^t D_j^t$ .



**Gambar 3. Implikasi dari Pemberlakuan Bea Keluar**  
**Figure 3. Implication of Export Tax Imposition**

Sumber: Munadi (2007)/Source: Munadi (2007)

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan instansi terkait maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dianggap relevan. Sebelum digunakan model pendekatan CGE yang berbasis pada Model ORANI-G maka harus dilakukan penyempurnaan basis data yang digunakan. Basis data yang digunakan adalah Tabel Input-Output (IO) pada tahun 2008 yang dapat melihat secara detil gambaran keterkaitan antar sektor dalam perekonomian nasional. Tabel IO Indonesia terdiri dari 175 sektor/kelompok komoditas.

Namun dari 175 kelompok komoditas tersebut, basis data yang khusus terkait dengan berbagai usaha di sektor kelautan dan perikanan hanya diwakili oleh 9 kelompok komoditas saja yaitu: 1) Sektor 23 : Tuna, Tongkol, Cakalang; 2) Sektor 24 : Ikan Tangkap Lainnya; 3) Sektor 25 : Ikan Patin; 4) Sektor 26 : Ikan Kerapu; 5) Sektor 27 : Rumput Laut; 6) Sektor 28 : Ikan Budidaya Lainnya; 7) Sektor 29 : Udang; 8) Sektor 35 : Ikan Kering; dan 9) Sektor 36 : Ikan Olahan. Seperti sektor-sektor perekonomian lainnya, sektor kelautan dan perikanan mengalami dinamika yang cukup cepat. Pada saat ini sektor kelautan dan perikanan mengalami peningkatan jumlah transaksi penawaran dan permintaan secara signifikan. Hal ini terjadi sebagai dampak dari dua hal berikut : 1) peningkatan volume produksi sektor kelautan dan perikanan; dan 2) bervariasinya komoditas kelautan dan perikanan yang diperdagangkan. Kelompok-

kelompok tersebut di atas merupakan komoditas-komoditas kelautan dan perikanan yang berperan penting bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan dan perekonomian nasional.

**Metode Analisis Data**

Menurut teori mikroekonomi dalam struktur perekonomian terdapat berbagai jenis pasar yang saling berinteraksi secara simultan. Perubahan yang terjadi pada satu pasar akan berpengaruh juga pada pasar yang lain. Keseimbangan secara umum dapat tercapai jika permintaan dan penawaran pada masing-masing pasar berada dalam keseimbangan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan ekonomi keseimbangan umum atau *Computable General Equilibrium* (CGE). Model CGE merupakan suatu pendekatan analisis yang melihat ekonomi sebagai sistem yang komprehensif dengan komponen-komponennya yang saling terkait satu sama lain (industri, rumah tangga, investor, pemerintah, importir dan eksportir). Keseimbangan umum dalam model CGE dicerminkan dalam bentuk nominal (kuantitas dikalikan dengan harga) yang mewakili aliran dana, baik disertai dengan aliran barang (transaksi) maupun tidak (transfer).

Model CGE dibangun berdasarkan pada teori keseimbangan umum yang menggabungkan asumsi mengenai perilaku yang rasional dari para pelaku ekonomi pada kondisi keseimbangan. Prosedur yang umum dalam analisis model keseimbangan umum adalah mendapatkan seluruh diferensial dari kondisi keseimbangan pasar dan menyelesaikan sistem persamaan (Böhringer *et al.*, 2003).

Menurut Xie dan Saltzman dalam Hayati (2012), terdapat empat spesifikasi utama sebagai asumsi model CGE yaitu: 1. Harga adalah endogen dalam model dan ditentukan oleh pasar; 2. Penawaran dan permintaan barang atau faktor-faktor produksi ditentukan dengan menyesuaikan harga berdasarkan teori keseimbangan umum Walrasian; 3. Fungsi penawaran dan permintaan diturunkan dari konsumen/produsen yang memaksimalkan utilitas / keuntungan; 4. Model adalah multi-sektoral dan non-linear, yang mengandung keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, model CGE yang menggabungkan sektor-sektor dan negara-negara dalam perekonomian global memiliki kemampuan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi (Hayati, 2012).

Pada prinsipnya, kerangka keseimbangan umum mencoba mencari dampak suatu *shock* terhadap variabel endogen (Parewangi, 2009). Perubahan variabel endogen ini dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu: (1) mencari perubahan global yang terjadi pada semua variabel endogen; dan (2) menggunakan perubahan lokal pada variabel endogen. Penelitian ini menggunakan metode kedua yang tergolong dalam analisa komparatif statis.

Mengikuti spesifikasi model yang diberikan oleh Anderson and Neary (1996), langkah pertama dalam membangun model keseimbangan umum adalah menspesifikasi sisi penawaran yang menentukan harga faktor dan pendapatan nasional dari sisi penerimaan (*income side*). Asumsikan terdapat  $j$  industri yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Setiap industri menggunakan  $H$  input untuk memproduksi  $q_j$  berdasarkan fungsi produksi  $q_j = F_j(e_j)$  dimana  $e_j = (e_{j1}, \dots, e_{jH})$  merupakan vektor input yang dipergunakan oleh industri  $j$ , baik input primer maupun input antara. Dengan asumsi bahwa fungsi produksi tersebut homogen dan linier maka ekspresinya dapat berbentuk,

$$1 = F_j(a_{j1}, \dots, a_{jH}) \dots\dots\dots(1)$$

dimana  $a_{jh} = e_{jh}/q_j$  merupakan permintaan atas faktor  $h \in H$  oleh setiap unit produk  $j \in J$ . Oleh karena faktor produksi diasumsikan homogen dan bergerak bebas lintas industri maka kondisi efisien akan terjadi ketika produktivitas marginal relatif input lintas industri sama dengan harga relatifnya. Apabila vektor harga input adalah  $w = (w_1, \dots, w_H)$  dan vektor harga output adalah  $p = (p_1, \dots, p_J)$ ,

maka kondisi keseimbangan pada sisi produksi terjadi ketika,

$$p_j (\partial F_j / \partial e_h) \leq w_h \quad j = 1, \dots, J; \quad h = 1, \dots, H \dots(2)$$

Jika vektor input yang tersedia dalam perekonomian adalah  $e = (e_1, \dots, e_H)$ , dengan asumsi bahwa penawaran setiap input tersebut inelastis, maka vektor  $e$  merupakan vektor yang konstan. Dalam hal ini, kondisi *full utilized* akan terjadi ketika,

$$e_h = \sum_{j=1}^H e_{jh} = a_{1h}q_1 + \dots + a_{Jh}q_J \quad h = 1, \dots, H \dots(3)$$

Secara matematis, set persamaan mulai dari (1) sampai (3) cukup untuk menyelesaikan persamaan simultan tersebut dan mencari penawaran setiap industri beserta harganya masing-masing, termasuk berapa tingkat produksi tiap-tiap industri, utilisasi input primer, dan harga relatif setiap input. Lebih spesifik, terdapat  $J + JH + H$  persamaan yang independen untuk mencari  $JH$  permintaan input optimal,  $H$  harga faktor, dan  $J$  suplai barang.

Untuk sisi permintaan, sepanjang jumlah input tersedia dalam jumlah tetap, maka harga relatif output sudah mengandung semua informasi yang dibutuhkan untuk menentukan fungsi permintaan dari masing-masing barang  $j$ :

$$d_j = d_j(p_1, \dots, p_j, \dots, p_J) \quad j = 1, \dots, J \dots\dots\dots(4)$$

Perlu dijelaskan bahwa vektor pendapatan yang umumnya muncul pada fungsi permintaan, dalam *frame* keseimbangan umum ini dapat dimunculkan dalam bentuk penerimaan konsumen atas kepemilikan input  $e_h$  dengan nilai balas jasa sebesar  $w_h$  untuk setiap input jenis  $h$  dari seluruh  $H$  input yang ada. Fungsi permintaan ini homogen pada derajat nol terhadap harga. Selanjutnya, kondisi keseimbangan pasar barang yang dicirikan oleh seimbangannya pengeluaran dan pendapatan pengguna (*user*) dapat ditentukan. Pada kondisi perekonomian tertutup, ketiadaan perdagangan akan membuat penawaran domestik sama dengan permintaan domestik:

$$q_j = d_j \quad j = 1, \dots, J \dots\dots\dots(5)$$

Kondisi tersebut tidak terlepas dari kendala pengeluaran dan pendapatan,

$$\sum_{j=1}^J p_j q_j \equiv \sum_{h=1}^H w_h e_h = \sum_{j=1}^J p_j d_j \dots\dots\dots(6)$$

yang berarti, ada satu persamaan yang hilang dari J persamaan pada (6) di atas. Dengan demikian, jumlah persamaan yang ada menjadi  $J + JH + H + J - 1$ , sementara jumlah variabel endogen yang harus dicari tetap terdiri dari J output, JH permintaan input, dan H harga input. Disini terlihat bahwa terjadi defisiensi sebesar 1 yang ditandai dengan jumlah variabel endogen yang lebih besar satu buah dibandingkan jumlah persamaan yang tersedia. Untuk menyelesaikannya, satu dari vektor harga output tersebut dijadikan pembanding (di-numeraire-kan). Harga ini akan menjadi pembanding terhadap harga-harga lain.

Langkah *numeraire* ini juga penting mengingat kerangka keseimbangan umum menekankan bahwa hanya harga relatif yang berpengaruh. Lebih lanjut, harga relatif ini memerlukan satu patokan dimana harga-harga lain akan mengacu pada harga tersebut. Jika dianggap penting untuk kemudahan analisis, pembanding tersebut dapat juga dinormalisir sehingga bernilai 1.

Selanjutnya, kondisi 7 keseimbangan autarki dapat diperoleh. Jika lebih lanjut diasumsikan terdapat N mitra dagang, maka kondisi keseimbangan pada persamaan (6) tidak dapat dipakai lagi. Sekarang, total produksi dunia harus seimbang dengan total konsumsi dunia,

$$\sum_{n=1}^N d_j^n = \sum_{n=1}^N q_j^n \quad j = 1, \dots, J \dots\dots\dots(7)$$

Asumsi adanya neraca perdagangan yang seimbang pada setiap negara berimplikasi bahwa nilai impor dan ekspor secara agregat akan sama,

$$0 = p_1^n (q_1^n - d_1^n) + \dots + p_j^n (q_j^n - d_j^n) + \dots + p_j^n (q_j^n - d_j^n) \quad n = 1, \dots, N \dots\dots\dots(8)$$

Agregasi persamaan (8) lintas negara dengan catatan bahwa perdagangan akan membawa harga yang sama lintas negara, maka akan diperoleh,

$$0 = p_1 \sum_{n=1}^N (q_1^n - d_1^n) + \dots + p_j \sum_{n=1}^N (q_j^n - d_j^n) + \dots + p_j \sum_{n=1}^N (q_j^n - d_j^n) \dots\dots\dots(9)$$

Mengikuti hukum Walras dengan J pasar, ketika J - 1 pasar sudah seimbang, maka pasar yang tersisa dijamin juga berada dalam kondisi keseimbangan. Implikasinya, penyelesaian keseimbangan pasar sejumlah J - 1 dengan harga pasar relatif juga sejumlah itu.

Jika harga pasar dunia dianggap eksogen, maka J persamaan pada (7), JH pada (6), H pada (3) dan J pada persamaan (4), dapat diselesaikan untuk tiap-tiap negara. Dalam hal ini, setiap negara harus mencari solusi sejumlah  $JH + 2J + H$  variabel endogen, yaitu  $a_{ij}$ ,  $q_j$ ,  $d_j$ , dan  $w_h$ . Satu-satunya penentu karakteristik keseimbangan lintas negara adalah pola distribusi awal dari *endowment* atas input yang dimiliki oleh setiap negara.

Tingkat harga komposit, dapat dibentuk dari rata-rata tertimbang dari vektor harga output atau secara umum sebagai  $P_c = P(p_1, \dots, p_j)$ . Melalui indeks harga ini, keterkaitan antara (i) pasar input yang dipengaruhi oleh efisiensi berproduksi; dan (ii) permintaan konsumen atas uang, dapat dihubungkan. Jika suplai uang melebihi kebutuhan sektor riil, maka komposit harga akan meningkat (inflasi) dan mempengaruhi tingkat harga untuk setiap output j, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan balas jasa nominal untuk setiap input,  $w_h$ .

Mengulang spesifikasi vektor harga seluruh barang di pasar dunia, domestik dan impor sebagai  $p_w = (p_{w1}, \dots, p_{wN})$ ,  $p_d = (p_{d1}, \dots, p_{dN})$  dan  $p_m = (p_{m1}, \dots, p_{mN})$ . Perlu diingat bahwa  $N \subset J$ . Harga sebuah komoditi, dipengaruhi oleh tiga jenis harga ini sehingga  $P_c = (p_d, p_m, p_w)$ . Keuntungan dari spesifikasi dengan cara ini adalah harga komposit  $P_c$  yang dibentuk dari harga barang  $p_j$  sudah merefleksikan semua yang terjadi baik dalam pasar. Dengan menggunakan harga komposit  $P_c$ , penelusuran atas sumber inflasi termasuk *imported inflation* dapat dilakukan.

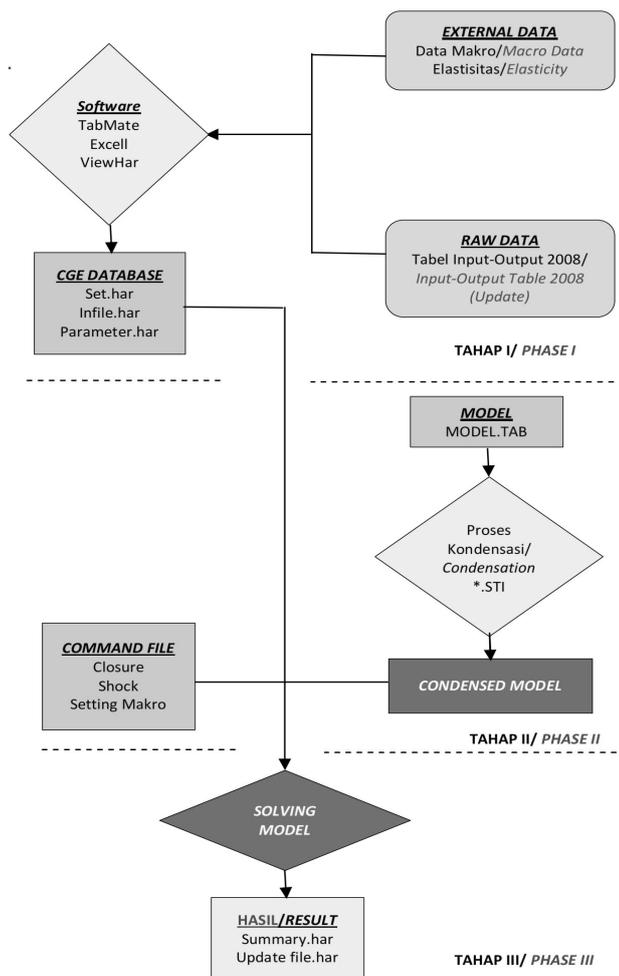
Pada prinsipnya, prosedur penggunaan model CGE dikelompokkan ke dalam tiga tahap utama, yaitu tahap konstruksi *database*, permodelan dan implementasi model. Tahap pertama sangat penting dan dimulai dari data yang paling terdisagregasi untuk memberikan fleksibilitas yang lebih luas pada analisis. Tahap kedua adalah pemodelan dimana penelitian ini menggunakan ORANI-G sebagai *template* yang kemudian dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah model terbentuk, proses yang dilakukan adalah mengkonsdensasi model untuk memperoleh model yang secara

ukuran dapat diatur (*sizely manageable*). Tahap ketiga adalah implementasi model yang dilakukan dengan simulasi. Untuk itu, perlu menyiapkan *command file* (\*.cmf) yang memuat: (1) pernyataan tentang file yang terlibat; (2) file yang akan dihasilkan; (3) metode aproksimasi (Euler, Gragg, Johansen); (4) kategorisasi variabel endogen dan eksogen; dan (5) spesifikasi variabel yang di-*shock* beserta besarnya. Di dalam *command file* ini, simulasi jangka panjang ataupun simulasi jangka pendek dapat dibuat dengan mendesain *closure*-nya (Parewangi, 2009). Ketiga tahap ini ditunjukkan oleh Gambar 4.

Kajian ini dianalisis dengan melakukan simulasi yang memilih tiga bentuk skenario, yaitu (1) pesimis dengan tarif 7,5%, (2) moderat dengan tarif 15%, dan (3) optimis dengan tarif 22,5%. Oleh karena bea keluar belum dikenakan terhadap komoditas perikanan maka besaran bea keluar untuk melakukan simulasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/

PMK.011/2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenai Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar untuk CPO yang dikenai bea keluar progresif. Peraturan tersebut mencantumkan bahwa bea keluar terendah sebesar 7,5 persen, moderat sebesar 10-15 persen dan yang tertinggi sebesar 22,5 persen.

Dari ketiga skenario tersebut, variabel yang dijadikan sebagai *shock* dalam pencapaian kinerja ekspor adalah pemberlakuan bea keluar terhadap komoditas perikanan primer (bahan mentah) yang berasal dari perikanan tangkap dan budidaya. Komoditas primer tersebut merupakan komoditas yang dijual dalam bentuk segar sehingga belum diolah menjadi komoditas lain sebagai upaya diversifikasi produk perikanan. Selanjutnya, ketiga tarif bea keluar dalam skenario tersebut akan dijadikan input bagi model ekonomi makro pembangunan kelautan dan perikanan untuk menghasilkan berbagai angka dampak dari kebijakan perdagangan luar negeri atau ekspor.



Gambar 4. Alur Kerja Model CGE dengan Pendekatan GEMPACK  
 Figure 4. Procedures of CGE Model with GEMPACK Approach

Sumber: Parewangi (2009)/Source: Parewangi (2009)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Bea Keluar Produk Perikanan Indonesia

Definisi industri mencakup dua pengertian, yaitu mikro dan makro. Secara mikro, industri adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang erat. Secara makro, definisi industri dari segi pembentukan pendapatan adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah, yakni semua produk, baik barang maupun jasa (Hasibuan, 1993). Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (2012) mendefinisikan industri pengolahan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Kebijakan bea keluar merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk mendorong hilirisasi industri melalui pemberian insentif pajak, penyediaan energi dan pembangunan infrastruktur. Namun bagi pihak pelaku usaha, bea keluar merupakan penggerak utama (*prime mover*) berjalannya roda hilirisasi industri. Kebijakan ini diperlukan dalam rangka mengembangkan industri hilir karena bagian hilir dari rantai nilai kegiatan ekonomi utama ini cenderung kurang menarik karena rendahnya margin yang diperoleh, tetapi di sisi lain bagian hilir ini dapat menyerap banyak produk hulu yang bermargin tinggi. Mekanisme kebijakan bea keluar ini adalah pengenaan pajak akan menambah penerimaan negara yang selanjutnya penerimaan tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan industri hilir (Brahmana *et al.*, 2014).

Program hilirisasi industri ini salah satunya dijalankan oleh sektor pertanian dimana pemerintah dan berbagai lembaga penelitian saat ini sangat gencar mempromosikan pengolahan berbagai produk pertanian. Salah satu contohnya adalah kebijakan peningkatan pengolahan biji kakao (tidak diekspor dalam bentuk biji) sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan menghindari isu kualitas. Selain itu, pemerintah bermaksud memajukan industri kakao di dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja. Salah satu kebijakan yang dipertimbangkan untuk mempercepat

promosi tersebut adalah dengan memberlakukan pajak terhadap ekspor biji kakao sehingga eksportir tidak tertarik mengekspor dalam bentuk biji (Arsyad *et al.*, 2011).

Selain itu, pajak ekspor juga diberlakukan terhadap minyak kelapa sawit yang digunakan sebagai instrumen untuk memonitor keluar masuknya minyak kelapa sawit ke pasar ekspor yang relatif lebih menguntungkan setiap saat. Manipulasi tingkat kebijakan pajak ekspor merupakan instrumen kebijakan yang sangat efektif dalam mengendalikan keluar masuknya jumlah minyak kelapa sawit yang akan diekspor. Pajak ekspor ini diberlakukan yang besarnya disesuaikan dengan variasi harga minyak kelapa sawit di dunia (Munadi, 2007).

Dengan demikian, bea keluar pada perikanan diasumsikan memiliki tujuan dan cara yang serupa dengan kebijakan pengenaan bea keluar pada produk pertanian tersebut. Dengan demikian, penelitian ini secara khusus memaparkan hasil simulasi pengenaan bea keluar terhadap produk primer perikanan.

### Dampak Terhadap Kinerja Makroekonomi

Dampak pemberlakuan tarif bea keluar atas komoditas primer perikanan terhadap variabel-variabel makroekonomi terlihat pada Tabel 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan persentase GDP adalah positif dengan nilai tertinggi ditunjukkan pada simulasi 3, yaitu 0,01%. Peningkatan nilai GDP ini disebabkan adanya peningkatan produksi produk olahan perikanan di dalam negeri. Pertumbuhan positif GDP ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 0,019 (simulasi 1), 0,034 (simulasi 2), dan 0,046 (simulasi 3).

Pemberlakuan bea keluar mempengaruhi ekspor perikanan secara nasional. Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberlakuan bea keluar sebesar 7,5% menurunkan ekspor produk perikanan secara nasional sebesar 0,02% dan besaran penurunannya meningkat pada saat pemberlakuan bea keluar 15% dan 22,5%, yaitu masing-masing sebesar 0,04% dan 0,05%. Penurunan ekspor yang cenderung rendah ini disebabkan karena produk primer perikanan cenderung memiliki kontribusi kecil pada kinerja ekspor nasional. Penurunan ekspor menyebabkan komoditas perikanan banyak terdapat di pasar dalam negeri sehingga kondisi ini mampu mendorong konsumsi rumah tangga sebesar 0,046% pada simulasi 3.

**Tabel 1. Hasil Simulasi Skenario dari Pemberlakuan Bea Keluar Komoditas Primer Perikanan Terhadap Peubah Makroekonomi Indonesia.****Table 1. Scenario Simulation Results of Export Tax on Primary Fisheries Commodities Against Indonesian Macroeconomic Variables.**

Indikator/Indicator	Perubahan (%) / Change (%)		
	Sim-1	Sim-2	Sim-3
PDB/ GDP	0.005	0.009	0.011
Investasi Agregat/ Agregat Investment	-0.001	-0.001	-0.002
Impor/ Import	0.003	0.005	0.007
Ekspor/ Export	-0.019	-0.037	-0.052
Konsumsi rumah tangga/ Household Consumption	0.019	0.034	0.046
Pengeluaran pemerintah pusat/ Government Expenditure	-0.018	-0.032	-0.045

Sumber: Hasil Olahan Data, 2014 (Diolah)/ Source: Processed Data, 2014

Keterangan/Description:

Sim-1 = simulasi 1; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 7,5%/

Sim-1 = simulation 1; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 7.5%

Sim-2 = simulasi 2; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 15%/

Sim-2 = simulation 2; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 15%

Sim-3 = simulasi 3; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 22,5%

Sim-3 = simulation 3; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 22.5%

### Dampak Terhadap Kinerja Sektoral

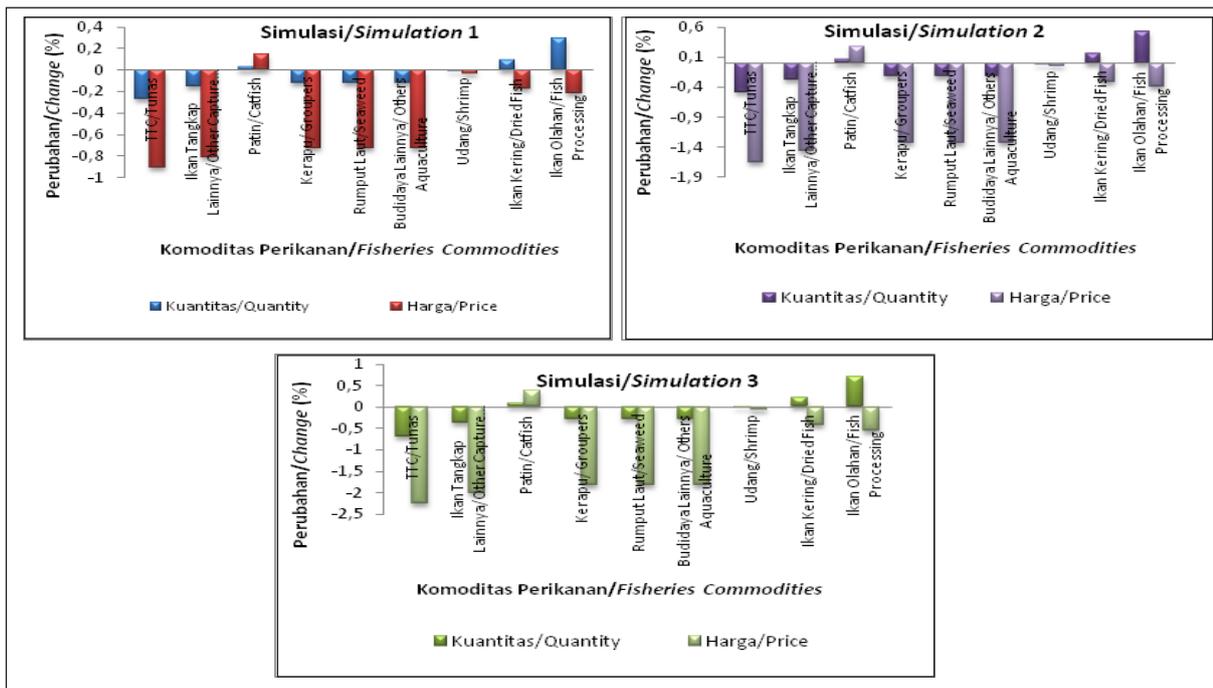
Secara teoritis, pemberlakuan bea keluar terhadap komoditas ekspor berbentuk bahan mentah akan mengurangi jumlah output komoditas tersebut karena adanya kebijakan yang membatasi pemasarannya di pasar luar negeri. Sebaliknya, output dari komoditas olahan meningkat karena bahan baku yang awalnya dijual ke luar negeri menjadi tersedia di dalam negeri. Meskipun demikian pada tulisan ini tidak semua perubahan output pada berbagai sektor ekonomi dibahas, namun difokuskan hanya pada beberapa sektor, di antaranya sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan sektor pengolahan hasil perikanan.

### Output dan Harga

Salvatore (2013) menjelaskan bahwa kebijakan pajak ekspor secara teoritis akan meningkatkan biaya produksi bagi sektor yang dikenai pajak sehingga menghambat produsen mengekspor komoditas yang dikenai pajak tersebut dan menjualnya di pasar domestik (Salvatore, 2013). Dengan kata lain, pajak ekspor dapat meningkatkan jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri olahan dari produk yang dikenai pajak ekspor tersebut. Hasil penelitian Purba (2012) menunjukkan bahwa pemberlakuan bea keluar pada CPO berpengaruh negatif terhadap ekspor CPO dan berpengaruh positif terhadap

ketersediaan bahan baku untuk industri minyak goreng. Sementara itu, hasil penelitian Agusalim (2014) menunjukkan hasil yang sebaliknya dimana bea keluar pada komoditas CPO mengakibatkan penurunan output CPO domestik yang menunjukkan bahwa komoditas CPO tersebut tidak terserap di pasar domestik (Gambar 5).

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori Salvatore (2013) dan hasil penelitian Purba (2012), namun sejalan dengan hasil penelitian dari Agusalim (2014) untuk sebagian besar komoditas primer perikanan, yaitu untuk komoditas TTC, kerapu, dan rumput laut. Pemberlakuan bea keluar menunjukkan dampak negatif bagi output dan harga komoditas primer perikanan. Dampak terbesar terjadi pada ikan TTC, ikan kerapu dan rumput laut yang masing-masing sebesar 0,68% dan 0,29% pada hasil simulasi 3. Hal ini disebabkan karena ketiga komoditas tersebut lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah sehingga komoditas perikanan tersebut tidak dapat terserap di pasar domestik. Berbeda dengan komoditas udang yang cenderung tidak berdampak pada outputnya karena udang yang diekspor umumnya sudah berbentuk produk olahan seperti data yang dikeluarkan KKP (2016) dimana komposisi ekspor udang terdiri dari udang segar sebesar 1,5%, udang olahan 27,9%, dan udang beku 70,6%.



**Gambar 5. Dampak Bea Keluar Terhadap Output Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia**  
**Figure 5. Impact of Export Tax on Output of Indonesian Marine and Fisheries Sector**

Sumber: Hasil Olahan Data, 2014 (Diolah) /Source: Processed Data, 2014

Sebaliknya, output dari komoditas patin justru mengalami peningkatan sebesar 0,08% (simulasi 3) karena patin lebih banyak dipasarkan di dalam negeri karena Indonesia belum mampu memproduksi patin olahan dalam bentuk *fillet* (daging tanpa tulang) yang menjadi permintaan terbesar dunia. Hingga saat ini ekspor patin Indonesia masih dalam bentuk utuh beku. Data dari Majalah Trobos (2016) menunjukkan bahwa patin yang diperdagangkan di dunia meliputi *fillet*, utuh beku, dan sedikit produk olahan. Dari total tersebut, lebih dari 92% permintaan dunia adalah dalam bentuk *fillet*. Sampai saat ini, 90% pasokan *fillet* patin dunia masih dikuasai oleh Vietnam, sedangkan sisa kuota 10% dibagi ke Banglades, Myanmar, dan Cina.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemberlakuan bea keluar memberi dampak positif pada produk olahan berupa ikan kering dan ikan olahan (Tabel 2). Peningkatan output ikan kering dan ikan olahan masing-masing sebesar 0,09% dan 0,29% (simulasi 1), 0,16% dan 0,53% (simulasi 2) serta 0,21% dan 0,72% (simulasi 3). Berdasarkan hasil simulasi tersebut, dampak terbesar ditunjukkan oleh simulasi 3 dimana output ikan kering dan ikan olahan masing-masing meningkat 0,21% dan 0,72%. Sebaliknya, harga untuk komoditas olahan menunjukkan penurunan yang disebabkan karena

bahan baku olahan berasal dari produk dalam negeri yang memiliki tingkat harga lebih rendah dibandingkan harga produk impor yang selama ini dijadikan sumber bahan baku industri pengolahan dalam negeri. Dampak penurunan harga ikan kering dan ikan olahan juga paling besar ditunjukkan oleh simulasi 3, yaitu masing-masing sebesar 0,43% dan 0,55% (Tabel 2)

### Dampak Terhadap Nilai Tambah (*Value Added*) Produk Perikanan

Bea keluar secara tidak langsung dianggap mempengaruhi nilai tambah dari suatu komoditas ekspor. Hal ini terbukti pada simulasi yang dilakukan, baik pada simulasi 1, simulasi 2 maupun simulasi 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai tambah (*value added*) untuk produk olahan hasil perikanan meningkat dengan adanya pemberlakuan bea keluar. Pemberlakuan pajak ekspor lebih besar menunjukkan peningkatan nilai tambah yang lebih besar pula. Hal ini ditunjukkan oleh simulasi 3 yang mengenakan bea keluar sebesar 22,5% mampu meningkatkan nilai tambah ikan olahan kering dan olahan lainnya masing-masing sebesar 0,21% dan 0,72%. Peningkatan nilai tambah ini lebih tinggi dibandingkan hasil simulasi 1 dan 2 yang hanya mengenakan pajak ekspor sebesar 7,5% dan 15%, yaitu masing-masing sebesar 0,09% dan 0,29% (simulasi 1) serta 0,16% dan 0,53 (simulasi 2).

**Tabel 2. Hasil Simulasi Skenario Pemberlakuan Bea Keluar Terhadap Output dan Harga Komoditas Primer Perikanan Indonesia.****Table 2. Scenario Simulation Results of Export Tax to Output and Price of Indonesian Primary Fisheries Commodities.**

Komoditas/ Commodities	Sim-1		Sim-2		Sim-3	
	Kuantitas (%)/ Quantity (%)	Harga (%)/ Price (%)	Kuantitas (%)/ Quantity (%)	Harga (%)/ Price (%)	Kuantitas (%)/ Quantity (%)	Harga (%)/ Price (%)
Ikan TTC/Tunas	-0.27	-0.91	-0.49	-1.65	-0.68	-2.26
Ikan Tangkap Lainnya/Other Capture Fish	-0.15	-0.81	-0.27	-1.47	-0.38	-2.01
Ikan Patin/Catfish	0.03	0.15	0.06	0.28	0.08	0.38
Ikan Kerapu/ Groupers	-0.12	-0.73	-0.21	-1.32	-0.29	-1.81
Rumput Laut/ Seaweed	-0.12	-0.73	-0.21	-1.32	-0.29	-1.81
Budidaya Lainnya/ Others Aquaculture	-0.12	-0.73	-0.21	-1.32	-0.29	-1.81
Udang/Shrimp	-0.001	-0.03	-0.001	-0.05	-0.001	-0.07
Ikan Kering/ Dried Fish	0.09	-0.17	0.16	-0.31	0.21	-0.43
Ikan Olahan/ Fish Processing	0.29	-0.22	0.53	-0.39	0.72	-0.55

Sumber/ Source: Hasil Olahan Data (Diolah), 2014/ Processed Data, 2014

Keterangan/ Description:

Sim-1 = simulasi 1; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 7,5%/

*Sim-1 = simulation 1; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 7.5%*

Sim-2 = simulasi 2; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 15%

*Sim-2 = simulation 2; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 15%*

Sim-3 = simulasi 3; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 22,5%

*Sim-3 = simulation 3; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 22.5%***Tabel 3. Dampak Pemberlakuan Bea Keluar Terhadap Nilai Tambah (Value Added) Produk Perikanan Indonesia****Table 3. Impact of Export Tax to Value Added of Indonesian Fisheries Products.**

Uraian/Details	Perubahan (%) / Change (%)		
	Sim-1	Sim-2	Sim-3
Ikan TTC/ Tunas	-0.27	-0.49	-0.68
Ikan Tangkap Lainnya/ Other Capture Fish	-0.15	-0.27	-0.38
Ikan Patin/ Catfish	0.02	0.06	0.08
Ikan Kerapu/ Groupers	-0.12	-0.21	-0.29
Rumput Laut/ Seaweed	-0.12	-0.21	-0.29
Budidaya Lainnya/ Other Aquaculture	-0.12	-0.21	-0.29
Udang/ Shrimp	-0.001	-0.001	-0.001
Ikan Kering/ Dried Fish	0.09	0.16	0.21
Ikan Olahan/ Fish Processing	0.29	0.53	0.72

Sumber/Source: Hasil Olahan Data (Diolah), 2014/ Processed Data, 2014

Keterangan/ Description:

Sim-1 = simulasi 1; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 7,5%/

*Sim-1 = simulation 1; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 7.5%*

Sim-2 = simulasi 2; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 15%

*Sim-2 = simulation 2; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 15%*

Sim-3 = simulasi 3; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 22,5%

*Sim-3 = simulation 3; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 22.5%*

### Dampak Terhadap Ekspor Komoditas Perikanan

Pemberlakuan bea keluar mempengaruhi ekspor perikanan secara signifikan, terutama bagi produk primer perikanan. Tabel 4 menunjukkan bahwa pemberlakuan bea keluar memberikan dampak negatif bagi ekspor dari produk primer perikanan pada ketiga simulasi. Dampak terbesar ditunjukkan oleh komoditas udang, yaitu sebesar 14,49% (simulasi 1), 26,22% (simulasi 2) dan 35,81% (simulasi 3). Dampak besar juga dialami oleh komoditas budidaya seperti ikan kerapu dan rumput laut. Sementara itu, ikan TTC cenderung memiliki dampak yang paling kecil, yaitu sebesar 12,83% (sim-1), 23,55% (sim-2) dan 32,57% (sim-3). Hal ini disebabkan oleh besarnya bea keluar bersifat progresif yang artinya semakin tinggi harga dan volume ekspor maka tarifnya akan makin tinggi. Dengan demikian, kondisi ini membuktikan bahwa komoditas udang menjadi penyumbang terbesar ekspor produk perikanan yakni sebesar 40 persen, sedangkan peringkat kedua diduduki oleh komoditi tuna, tongkol, cakalang (TTC) sebesar 12 persen dari total keseluruhan kinerja ekspor (KKP, 2013).

Kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh komoditas olahan seperti ikan kering dan ikan olahan. Tabel 4 menunjukkan bahwa pemberlakuan bea keluar pada ketiga simulasi justru mampu meningkatkan ekspor kedua produk olahan ikan tersebut, yaitu masing-masing sebesar 0,74% dan 0,96% (sim-1), 1,35% dan 1,75% (sim-2)

serta 1,86% dan 2,41% (sim-3). Dampak terbesar ditunjukkan oleh simulasi 3 yang mengenakan bea keluar sebesar 22,5% karena kebijakan ini memaksa ikan hasil tangkapan dan budidaya untuk dipasarkan di dalam negeri sehingga kebutuhan bahan baku industri pengolahan dapat terpenuhi dengan mudah. Pada akhirnya, kondisi ini mengakibatkan produk ikan olahan akan lebih banyak diekspor ke pasar luar negeri yang nantinya akan mampu meningkatkan nilai ekspor yang diinginkan (Gambar 6).

### Dampak Terhadap Impor Komoditas Perikanan

Pemberlakuan bea keluar juga memberikan dampak pada perdagangan sektor kelautan dan perikanan dengan luar negeri melalui kegiatan impor seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 5. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemberlakuan bea keluar memberikan dampak negatif pada impor ikan TTC dan ikan tangkap lainnya dimana dampak terbesarnya diperlihatkan pada pemberlakuan bea keluar yang paling besar juga pada simulasi 3, yaitu masing-masing sebesar 4,41% dan 3,60%. Selain ikan, penurunan impor juga ditunjukkan oleh komoditas udang yang cukup signifikan, yaitu sebesar 23,09% pada simulasi 3. Hal ini disebabkan oleh tersedianya bahan baku bagi industri pengolahan yang selama ini sangat bergantung pada produk impor, terutama untuk ikan sarden, makarel, jenis ikan laut lainnya yang biasanya diolah menjadi ikan pindang, ikan kaleng, atau tepung ikan (Gambar 7).

**Tabel 4. Dampak Pemberlakuan Bea Keluar Terhadap Ekspor Komoditas Perikanan Indonesia.**  
**Table 4. Impact of Export Tax to Indonesian Fisheries Export Commodities.**

Uraian/Details	Perubahan (%) / Change (%)		
	Sim-1	Sim-2	Sim-3
Ikan TTC/ Tunas	-12.83	-23.55	-32.57
Ikan Tangkap Lainnya/ Other Capture Fish	-13.03	-23.87	-32.95
Ikan Patin/ Catfish	0	0	0
Ikan Kerapu/ Groupers	-13.18	-24.12	-33.26
Rumput Laut/ Seaweed	-13.18	-24.12	-33.26
Budidaya Lainnya/ Other Aquaculture	-13.18	-24.12	-33.26
Udang/ Shrimp	-14.49	-26.22	-35.81
Ikan Kering/ Dried Fish	0.74	1.35	1.86
Ikan Olahan/ Fish Processing	0.96	1.75	2.41

Sumber/ Source : Hasil Olahan Data (Diolah)/ Processed Data, 2014

Keterangan/ Description:

Sim-1 = simulasi 1; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 7,5%/

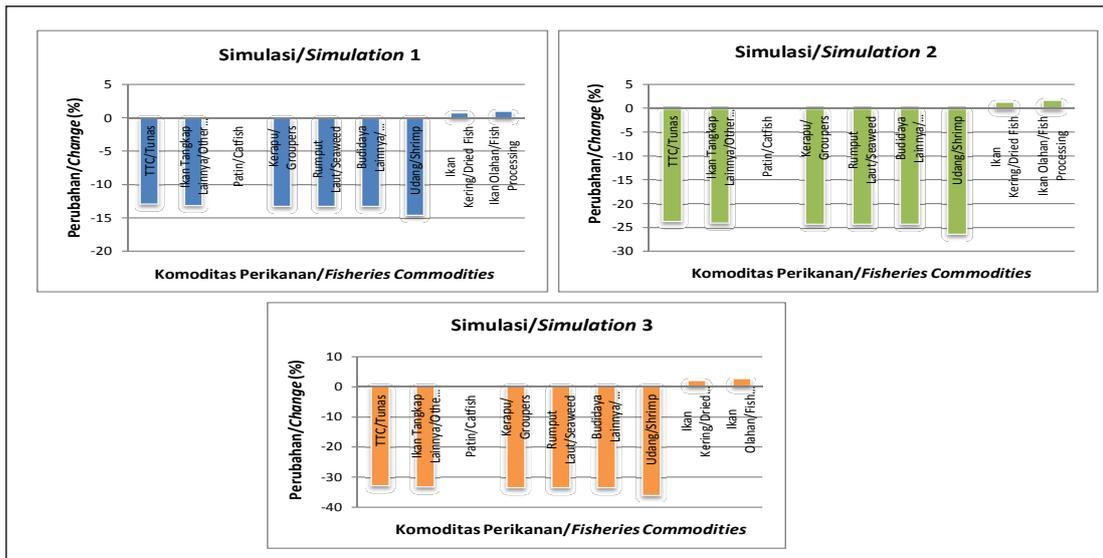
Sim-1 = simulation 1; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 7.5%

Sim-2 = simulasi 2; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 15%/

Sim-2 = simulation 2; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 15%

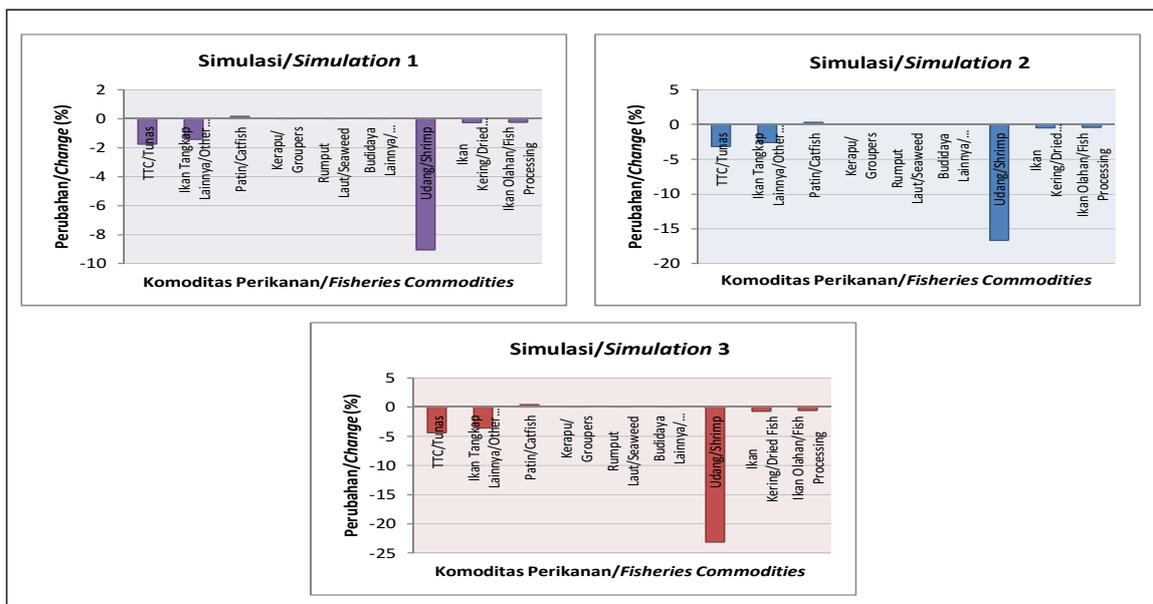
Sim-3 = simulasi 3; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 22,5%/

Sim-3 = simulation 3; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 22.5%



Gambar 6. Dampak Bea Keluar Terhadap Ekspor Komoditas Kelautan dan Perikanan Indonesia  
 Figure 6. Impact of Export Tax on Commodities Export of Indonesia's Marine and Fisheries

Sumber: Hasil Olahan Data (Diolah)/ Source:Processed Data, 2014



Gambar 7. Dampak Bea Keluar Terhadap Impor Komoditas Kelautan dan Perikanan Indonesia  
 Figure 7. Impact of Export Tax on Commodities Import of Indonesian Marine and Fisheries

Sumber : Hasil Olahan Data (Diolah)/ Source:Processed Data, 2014

Penurunan impor juga ditunjukkan oleh produk olahan berupa ikan kering dan olahan lainnya dimana dampak terbesar ditunjukkan oleh simulasi 3 yang mengenakan bea keluar sebesar 22,5%. Impor ikan kering dan ikan olahan lainnya adalah masing-masing sebesar 0,28% dan 0,25% (sim-1), 0,52% dan 0,45% (sim-2) serta 0,71% dan 0,61% (sim-3). Dampak negatif terhadap impor kedua komoditas ini disebabkan oleh karena kebijakan pemberlakuan bea keluar telah mendorong industri

pengolahan dalam negeri berproduksi karena tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Dengan demikian, konsumen dalam negeri dapat memperoleh produk olahan ikan dari pasar dalam negeri sehingga dengan sendirinya kebutuhan impor menurun. Kondisi ini menunjukkan roda ekonomi dalam negeri lebih mandiri karena kegiatan ekonomi tidak lagi bergantung pada produk impor, tetapi sangat bergantung pada produk dalam negeri.

**Tabel 5. Dampak Pemberlakuan Bea Keluar Terhadap Impor Komoditas Perikanan Indonesia.**  
**Table 5. Impact of Export Tax to Indonesian Fisheries Import Commodities.**

Uraian/Details	Perubahan (%) / Change (%)		
	Sim-1	Sim-2	Sim-3
Ikan TTC/Tunas	-1.75	-3.20	-4.41
Ikan Tangkap Lainnya/Other Capture Fish	-1.44	-2.62	-3.60
Ikan Patin/Catfish	0.17	0.31	0.42
Ikan Kerapu/Groupers	0.02	0.03	0.04
Rumput Laut/Seaweed	0.02	0.03	0.04
Budidaya Lainnya/Other Aquaculture	0.02	0.03	0.04
Udang/Shrimp	-9.04	-16.65	-23.09
Ikan Kering/Dried Fish	-0.28	-0.52	-0.71
Ikan Olahan/Fish Processing	-0.25	-0.45	-0.61

Sumber : Hasil Olahan Data (Diolah) / Processed Data, 2014

Keterangan/ Description:

Sim-1 = simulasi 1; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 7,5%/

Sim-1 = simulation 1; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 7.5%

Sim-2 = simulasi 2; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 15%/

Sim-2 = simulation 2; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 15%

Sim-3 = simulasi 3; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 22,5%/

Sim-3 = simulation 3; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 22.5%

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### Kesimpulan

Secara keseluruhan, program peningkatan nilai ekspor perikanan yang dilakukan melalui instrumen pengenaan tarif bea keluar sebesar 22,5% akan memberikan dampak positif yang relatif besar terhadap perekonomian nasional dan sektor kelautan dan perikanan dibandingkan dengan pengenaan tarif bea keluar sebesar 7,5% dan 15%. Khusus untuk sektor kelautan dan perikanan, secara relatif program tersebut lebih memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi perikanan sekunder (pengolahan) dibandingkan dengan perikanan primer (tangkap dan budidaya).

Dampak positif pengenaan tarif bea keluar sebesar 22,5% terhadap perekonomian nasional ditunjukkan oleh perubahan kinerja makroekonomi berupa peningkatan GDP sebesar 0,01%, investasi sebesar 0,002%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 0,046%. Dampak negatifnya relatif kecil, yaitu penurunan ekspor sebesar -0,052% dan pengeluaran pemerintah pusat sebesar -0,045%, serta peningkatan impor sebesar 0,007%.

Sementara terhadap kinerja sektor perikanan, dampak pengenaan tarif bea keluar sebesar 22,5% bervariasi menurut jenis ikan dan kelompok perikanan (primer dan sekunder). Untuk kelompok perikanan primer, baik dari perikanan tangkap laut dari jenis ikan TTC dan ikan tangkap lainnya, dan perikanan budidaya dari jenis ikan

kerapu, rumput laut dan ikan budidaya lainnya, serta udang, pengenaan tarif bea keluar sebesar 22,5% memberikan dampak yang negatif, berupa penurunan output berkisar sebesar -0,68% hingga dan -0,001%, harga berkisar sebesar -2,26% dan -0,07%, nilai tambah berkisar sebesar -0,68% hingga -0,001%, ekspor berkisar -35,81% hingga -32,95%; namun berdampak positif berupa penurunan impor berkisar sebesar -4,41% dan -0,04%. Sebaliknya untuk ikan patin, justru berdampak positif berupa peningkatan output sebesar 0,08%, harga sebesar 0,38%, nilai tambah sebesar 0,08%, namun tidak memberikan dampak (tetap) pada kinerja ekspornya (karena komoditas patin belum termasuk sebagai komoditas perikanan dengan nilai ekspor yang relatif besar, bahkan dianggap tidak diekspor), dan berdampak negatif berupa peningkatan impor sebesar 0,42%.

Berbeda halnya dengan kelompok perikanan primer, pengenaan tarif bea keluar sebesar 22,5% secara keseluruhan memberikan dampak yang positif bagi kinerja ekonomi kelompok perikanan sekunder (industri pengolahan hasil perikanan). Untuk ikan kering dan ikan olahan, pengenaan tarif tersebut berdampak positif berupa peningkatan output masing-masing sebesar 0,21% dan 0,72%, nilai tambah masing-masing sebesar 0,21% dan 0,72%, ekspor masing-masing sebesar 1,86% dan 2,41%, dan penurunan impor masing-masing -0,71% dan -0,61%; namun masih memberikan dampak penurunan harga yang masing-masing sebesar 0,43% dan 0,55%.

## Implikasi Kebijakan

Mengingat bahwa peningkatan nilai ekspor perikanan melalui pengenaan tarif bea keluar dapat memberikan dampak yang positif berupa peningkatan kinerja makroekonomi Indonesia dan kinerja ekonomi sektor kelautan dan perikanan (KP), meskipun juga memberikan dampak yang negatif terutama berupa peningkatan impor di sektor KP namun hal terjadi pada tingkatan yang relatif rendah. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat lebih mendorong upaya peningkatan ekspor melalui pengenaan tarif tersebut, tetapi harus dilakukan secara hati-hati terutama yang dikaitkan dengan perubahan-perubahan kondisi perekonomian negara importir dan global. Hal ini penting mengingat faktor eksternal dari negara-negara mitra sangat menentukan perekonomian Indonesia di era globalisasi ini. Dengan demikian, semua kebijakan yang diambil pemerintah tidak justru merugikan industri perikanan dalam negeri.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah memberi kepercayaan kepada tim penulis menjadi pelaksana kegiatan penelitian pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2014. Terima kasih juga tim penulis sampaikan kepada tim dari Universitas Padjajaran Bandung yang bersedia membangun kerjasama dengan tim Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membangun model ekonomi yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan perikanan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L. 2014. Pajak Ekspor, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan: Kasus Agroindustri di Indonesia. *KINERJA*, Volume 18, No. 2: 180-194.
- Anderson, J. E. and J. P. Neary. 1996. A New Approach to Evaluating Trade Policy, *Review of Economic Studies*, 63, 107-125.
- Anonim. 2011. Kajian Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Keluar Komoditas Pertanian. Diunduh dari website [http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/Anjak\\_2011\\_4\\_07](http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/Anjak_2011_4_07) tanggal 28 November 2014.
- Arsyad, M., B. M. Sinaga dan S. Yusuf. 2011. Analisis Dampak Kebijakan Pajak Ekspor dan Subsidi Harga Pupuk Terhadap Produksi dan Ekspor Kakao Indonesia Pasca Putaran Uruguay.

*Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Volume 8, Nomor 1, hal. 63—71.

- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2012. *Pendapatan Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Böhringer, C., T. Rutherford and W. Wiegard. 2003. *Computable General Equilibrium Analysis: Opening a Black Box*. Centre for European Economic Research, Discussion Paper No. 03-56, Mannheim.
- Brahmana, G. A., H. Wijaya, L. A. Nursyaifullah, M. M. Hamzah dan R. Budiman. 2014. *Kajian Tentang Kebijakan Pajak Ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia*. Diunduh dari website [www.catatan-ek18.blogspot.com](http://www.catatan-ek18.blogspot.com) pada tanggal 6 Februari 2016.
- Hasibuan, N. 1993. *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*. LP3ES. Jakarta.
- Hayati, M. 2012. *Pemahaman Dasar Analisis Model Computable General Equilibrium (CGE)*. Madura: Universitas Trunojoyo, Program Studi Agribisnis.
- Helpman, E. and P. R. Krugman. 1989. *Trade Policy and Market Structure*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP]. 2015. *Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2015*. Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kusumastanto, T. 2008. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Indonesia*. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
- Munadi, E. 2007. Penurunan Pajak Ekspor dan Dampaknya Terhadap Ekspor Minyak Kepala Sawit Indonesia ke India (Pendekatan Error Correction Model). *Informatika Pertanian* Volume 16 No. 2, 2007, hal. 1019—1036.
- Parewangi, A. M. A. 2009. Dampak Krisis Global Terhadap Perekonomian Daerah: Aplikasi Model Computable General Equilibrium di Maluku. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 11 No. 4, hal. 323-343.
- Purba, J. H. V. 2012. *Dampak Pajak Ekspor Crude Palm Oil Terhadap Industri Minyak Goreng Indonesia*. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ratri, M. E. 2014. *Pajak Ekspor Perikanan: KKP Belum Berniat Terapkan Pajak Ekspor Perikanan*. Diunduh dari website <http://nasional.kontan.co.id/news/kkp-belum-berniat-terapkan-pajak-ekspor-perikanan-pada-tanggal-4-november-2014>.
- Salvatore, D. 2013. *International Economics: Trade and Finance*. 11th Edition. John Wiley & Sons, Inc. United Kingdom. 808p.

- Suhana. 2012. Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nasional. Dikutip dari artikel di Tabloid Inspirasi, 9 Agustus 2012, diunduh dari website <http://suhana-ocean.blogspot.com/2012/08/rekonstruksi-kebijakan-ekonomi-kelautan.html> diunduh pada tanggal 3 November 2014.
- Surono dan M. Jafar. 2013. Kajian Akademis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Kajian Atas Kebijakan Pengenaan Pajak Ekspor Terhadap Bijih (Raw Material Atau Ore) Mineral. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan RI.
- Trobos. 2016. Ekspor Olahan Patin Peluang dan Daya Saing Indonesia. Dikutip dari artikel di Majalah Trobos, 15 November 2016, diunduh dari website <http://www.trobos.com/detail-berita/2016/11/15/86/8152/ekspor-olahan-patin-peluang-dan-daya-saing-indonesia-> diunduh pada tanggal 26 Desember 2016.